

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Desentralisasi fiskal, yang merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar level pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Nur Azizah,2017). Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi telah dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi sehingga yang terakhir adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Haryanto 2017).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai dengan asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan pada pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan yang mungkin terjadi baik antardaerah atau horizontal imbalances maupun antara pemerintah pusat dan daerah atau vertical imbalances (Haryanto 2017).

Teori Fiskal Federalism menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002). Fungsi utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Faridi, 2011).

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah.

Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga masyarakat sejahtera. Teori Federalisme Fiskal (*fiscal federalism theory*) adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya (Sari dan Supadmi, 2016).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan total output secara terus menerus dalam jangka panjang. Definisi pertumbuhan

ekonomi yang dimaksud adalah terlepas dari kenaikan yang lebih besar atau lebih kecil dari laju pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak (Sukirno, 1981). Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan proses dalam jangka panjang, penjelasan tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi satu sama lain, menyebabkan proses pertumbuhan (Arsyad, 1999).

Istilah pertumbuhan ekonomi sering didefinisikan oleh para ahli dalam hal pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan standar hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan rendah, tetapi biasanya istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyatakan pembangunan ekonomi di negara maju dan syarat pembangunan ekonomi untuk negara. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Ekonomi dapat berkembang jika negara yang dinyatakan dalam pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan untuk meningkat dalam jangka panjang. Tetapi tidak berarti peningkatan terus menerus. Suatu ekonomi akan dapat mengalami penurunan tingkat aktivitas ekonomi jika terjadi resesi ekonomi, gejolak politik dan penurunan ekspor. Tetapi jika situasi seperti itu hanya sementara, kegiatan ekonomi meningkat rata-rata dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat dapat dikatakan mengalami perkembangan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir mencakup semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode satu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu daerah.

Ada dua faktor sebagai syarat terjadinya pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor utama yang meliputi sumber-sumber ekonomi/faktor-faktor produksi dan faktor penunjang yang meliputi stabilitas politik dan keamanan, perkembangan ekonomi dunia dan lembaga-lembaga ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Subandi adalah kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak (Anggatia Ariza,2016).

2. Distribusi Pendapatan

Distribusi Pendapatan adalah pembagian hasil di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Akan tetapi pada saat lain akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam, atau faktor keahlian sehingga, pada saat tertentu

akan menerima bagian pendapatan dan pada saat lain akan membayar harga barang. Dalam proses produksi, masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima imbalan jasa sebagai berikut :

- a. Pemilik faktor sumber alam berupa tanah akan menerima sewa tanah
- b. Pemilik faktor tenaga kerja akan menerima upah kerja
- c. Pemilik modal akan menerima bunga modal
- d. Pengusaha akan menerima laba usaha

Melalui proses produksi yang ada pada masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima bagian dan distribusi pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing penyedia faktor produksi tergantung pada besar kecilnya jasa yang disumbangkan dalam proses produksi. Distribusi pendapatan ditinjau dari sistem perekonomian dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Distribusi pendapatan sistem liberalis

Adalah pendapatan yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur

- b. Distribusi pendapatan sistem sosialis

Adalah pembagian pendapatan bagi masyarakat yang ditentukan oleh pihak pemerintah

- c. Distribusi pendapatan sistem campuran

Adalah pendistribusian yang ditentukan berdasarkan mekanisme dipasar dan oleh pemerintah (Tiffany, Daisy & Mauna, 2016).

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Standar Akuntansi Pemerintah).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pemeliharaan pada kelompok belanja operasional.

Di dalam belanja modal, terdapat berbagai pengeluaran yang bersifat mempertahankan atau menambah manfaat dan kualitas aset. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal dengan syarat sebagai berikut:

- a. Pengeluaran yang mengakibatkan perolehan aset tetap;
- b. Pengeluaran yang melebihi kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Perolehan aset tetap tersebut tidak ditujukan untuk dijual kembali atau dibagikan;

c. Merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ghozali (2008) membagi belanja modal ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda;
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda;
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual;

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat beberapa jenis belanja modal sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

★ Belanja modal tanah adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan sawah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk di dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak, sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Paradigma pembangunan manusia merupakan proses atau kegiatan pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus utama, dan bukan hanya sebagai sasaran akhir, dari seluruh kegiatan tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), serta meningkatkan pendidikan (keterampilan baca tulis) untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi. Paradigma pembangunan manusia terdiri atas empat komponen yaitu:

a. Produktivitas

Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi secara penuh dalam memperoleh penghasilan atau pekerjaan yang berubah.

b. Akses

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil.

c. Kesenambungan

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang.

d. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi hidup masyarakat itu sendiri.

C. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
1	Masrida Zasriati (2015)	Variabel Independen : 1. Belanja Modal Variabel Dependen : 1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Pertumbuhan Ekonomi	1. Belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi
2	Dewi & Soejoto (2017)	Variabel Independen : 1. Distribusi Pendapatan 2. Tingkat Pengangguran 3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Variabel Dependen : 1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM 2. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

3	Anggatia Ariza (2016)	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Belanja Modal <p>Variabel Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM
4	Syamsul Arifin (2017)	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Pengeluaran Pemerintah 3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan <p>Variabel Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan berpengaruh positif terhadap IPM 2. Pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif terhadap IPM
5	Milan & Dwirandra (2017)	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Belanja Modal 3. Dana Alokasi Umum (DAU) <p>Variabel Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD berpengaruh positif terhadap IPM 2. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap IPM 3. DAU berpengaruh positif terhadap IPM

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

6	Ayu, dkk (2019)	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Pengangguran Terbuka <p>Variabel Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap IPM
7	Alexandra Hukom (2015)	<p>Effect of Capital Expenditures, Economic Growth and Poverty on Human Development in Central Kalimantan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan berpengaruh positif terhadap IPM
8	Amirul Zamharir (2016)	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Kemiskinan 3. PDRB per kapita 4. Upah Minimum <p>Variabel Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan upah minimum berpengaruh positif terhadap IPM 2. Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM

D. KERANGKA PEMIKIRAN

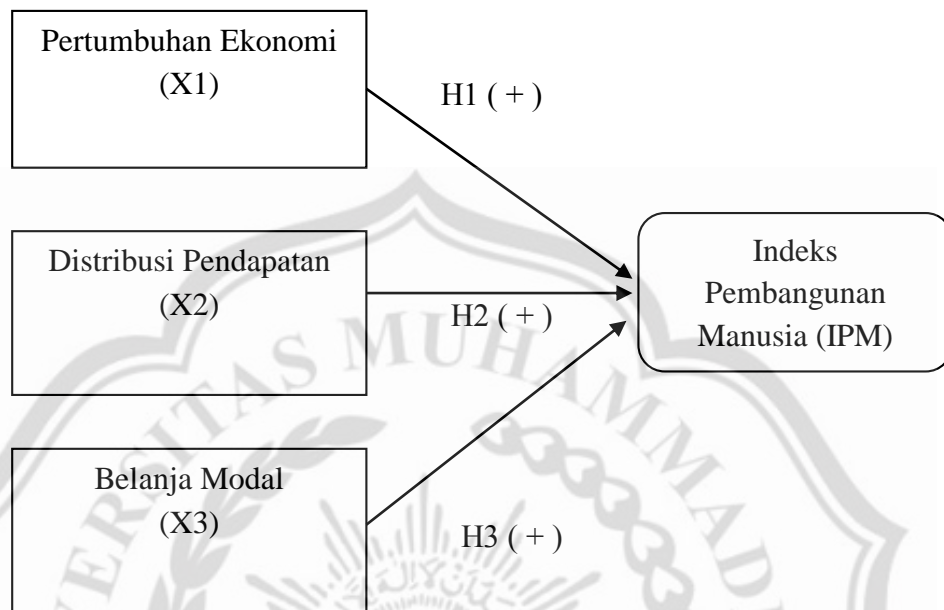
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, berketerampilan serta mempunyai pendapatan untuk layak hidup (Badan Pusat Statistika (BPS), 2015). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan domestik bruto tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang sering dikaitkan dengan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Pada Teori Fiscal Federalism menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah fungsinya untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah adalah dengan menghitung pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Apabila PDRB naik, maka akan menyebabkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat juga akan naik, sehingga dengan naiknya pendapatan

perkapita maka tingkat konsumsi juga ikut meningkat, dan pada akhirnya tingkat indeks pembangunan manusia akan meningkat.

Selanjutnya Distribusi pendapatan diduga juga mempengaruhi tingkat IPM. Distribusi pendapatan adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Kesejahteraan merupakan tujuan utama dalam suatu pembangunan, tujuan dari pembangunan itu sendiri ialah mensejahterakan masyarakat baik di pedesaan maupun diperkotaan. Namun, kesejahteraan tidak hanya diukur dengan besarnya pendapatan Nasional dan per kapita saja tapi juga bagaimana pendapatan Nasional distribusikan dengan merata, masalah ini merupakan masalah keadilan. Pemerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah menggunakan Desentralisasi Fiskal sebagai instrumen dalam mengelola dan menentukan jumlah uang yang akan didistribusikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan distribusi antar masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan akan mengakibatkan kekacauan diantara pihak kaya dan miskin. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan akan membuat jurang pemisah antara kaya dan miskin. Apabila dibiarkan akan menyebabkan kemiskinan yang meningkat. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Faktor lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia adalah Belanja modal. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk membentuk modal yang bersifat menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat selama satu periode akuntansi. Belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah merealisasikan belanja modal untuk kebutuhan barang publik seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan pemerintah, hal ini sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu mencakup bagaimana pemerintah mengalokasikan dana untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan. Sejalan dengan peningkatan pelayanan pemerintah (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia yang diharapkan. Ini berarti semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan, itu akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Gambar 2.1 Model Penelitian



E. HIPOTESIS

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. *United Nation Development Programme* (UNDP) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan secara otomatis, namun apabila kedua hal tersebut disatukan pada satu kebijakan pembangunan yang searah, maka akan tercipta suatu kekuatan yang dapat saling mendorong. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output per kapita yang menunjukkan pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator. Melalui anggaran belanja, pengeluaran pemerintah sebagian digunakan untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastuktur yang penting (Anggatia Ariza,2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggatia Ariza (2016) membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviatamara (2019) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM

2. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah penyebaran pendapatan atau perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat (Todaro, 2003:178). Maksudnya, distribusi pendapatann merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapatan yang lebih besar antara lapisan dalam

masyarakat sehingga kesejahteraan hanya dapat dirasakan oleh golongan tertentu saja.

Kenaikan rasio gini akan menyebabkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia, sebaliknya jika rasio gini turun maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan turun. Pemerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketimpangan distribusi pendapatan akan mengakibatkan kekacauan diantara pihak kaya dan miskin. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan akan membuat jurang pemisah antara kaya dan miskin. Apabila dibiarkan akan menyebabkan kemiskinan yang meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2017) membuktikan bahwa Distribusi Pendapatan memberikan pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meydiasari (2017) menyatakan bahwa Distribusi Pendapatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_2 : Distribusi Pendapatan berpengaruh positif terhadap IPM

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Standar Akuntansi Pemerintah).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan pemerintah. Sejalan dengan peningkatan pelayanan pemerintah (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggatia Ariza (2016) membuktikan bahwa Belanja Modal memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyatari (2017) menyatakan bahwa Belanja Modal memberikan pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM

